



**LAUNCHING** Volcano Durian Indonesia pada kegiatan pelepasan ekspor durian beku Indonesia di PT Duco food Indonesia Kelurahan Baiya Kota Palu. FOTO: IST

## Volcano Durian Indonesia Resmi Menggema ke Pasar Dunia

**SULTENG RAYA** – Di tengah semangat ekspor yang menggeliat dalam agenda Berani Ekspor Raya Durian Sulteng Nambaso, Kamis (16/4/2026), sebuah langkah besar lahir dari tanah Palu. Bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan identitas: Indonesia kini punya wajah baru untuk durian di pasar global—Volcano Durian Indonesia. Peluncuran branding nasional ini menjadi penanda babak baru perjalanan durian Indonesia. Sebuah upaya kolektif yang digagas bersama pemerintah dan Asosiasi Perkebunan Durian Indonesia (APDURIN), untuk menyatukan kekuatan yang selama ini tersebar dalam ratusan varietas lokal. Di hadapan pelaku usaha dan pemangku kepentingan, Sekretaris Jenderal APDURIN, Aditya Pradewo, menyampaikan pesan yang lebih dari sekadar strategi dagang. Ia berbicara tentang identitas, tentang bagaimana Indonesia harus hadir dengan satu nama yang kuat di tengah kompetisi global.

Baca **VOLCANO** Hal. 7

### AS-IRAN PERANG

## Kim Jong Un Genjot Senjata Nuklir Korut



Kim Jong Un tingkatan kemampuan bom nuklir di tengah perang AS dan Iran. FOTO: VIA REUTERS/KCNA

**SULTENG RAYA** - Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi menyatakan Korea Utara telah meningkatkan kemampuan untuk memproduksi senjata nuklir.

Pernyataan ini disampaikan Grossi pada Rabu (15/4) berdasarkan pemantauan terbaru terhadap aktivitas nuklir negara itu di tengah perang AS dan Iran.

"Semua itu menunjukkan peningkatan yang serius dalam kemampuan DPRK di bidang produksi senjata nuklir," kata Grossi, dikutip The Straits Times.

Baca **GENJOT** Hal. 7

### TAHUN 2026

## Harga BBM Subsidi Dipastikan Tidak Naik



MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. FOTO: ANTARA/KEMENTERIAN ESDM

**SULTENG RAYA** - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, ia mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis.

Setelah menghadap Presiden di Istana Negara, Bahlil mengatakan bahwa stabilitas harga BBM subsidi masih sejalan dengan kondisi pasokan energi nasional yang terjaga.

Baca **HARGA** Hal. 7

### KEJARI PARMOUT

## Telusuri Dugaan Penyimpangan Pembangunan Musala Inspektorat

**SULTENG RAYA** - Riak dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan musala di lingkungan Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong mulai memasuki babak baru. Kejaksan Negeri Parigi Moutong (Kejari) kini turun langsung, menelusuri setiap jejak informasi yang berkembang di ruang publik.

Langkah itu ditandai dengan dimulainya proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), sebuah fase awal dalam penegakan hukum yang kerap menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut sebuah perkara.

Dibalik meja kerja yang penuh berkas, tim intelijen



PROYEK pembangunan musala di kantor Inspektorat Parigi Moutong yang sedang diselidiki oleh Kejari Parigi Moutong. FOTO: ASLAN LAEHO

Kejari bergerak mengumpulkan data, menyaring informasi, hingga mencocokkan fakta-fakta awal. Kepala Seksi Intelijen, Rony Hotman Gunawan, membenarkan proses tersebut tengah berjalan.

"Iya, saat ini kami masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan. Ini bagian dari proses awal untuk mendalami informasi yang berkembang," ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Menurut Rony, derasnya sorotan publik dan pemberitaan yang beredar turut menjadi pemicu percepatan langkah Kejari. Isu menge-

Baca **TELUSURI** Hal. 7

## Ketua DPRD Sulteng Ikuti KPPD di Akmil Magelang



KETUA DPRD Sulteng, M Arus Abdul Karim (kedua dari kiri) mengikuti KPPD di kampus Akmil Magelang, Jateng, Rabu (15/4/2026). FOTO: IST

**SULTENG RAYA** - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, sejak Rabu sore (15/4/2026)

mengikuti Kursus Peman-tapan Pimpinan Daerah (KPPD).

Kegiatan KPPD ini diikuti oleh para Ketua DPRD pro-

vinsi dan kabupaten se-Indonesia yang dipusatkan di Kampus Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Kehadiran Arus Abdul Karim dalam forum elite yang diikuti para Ketua DPRD provinsi dan kabupaten se-Indonesia ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sulawesi Tengah tengah bergerak naik kelas. Kegiatan bergengsi ini diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan akan berlangsung selama sepekan.

Tak sekadar seremoni, KPPD menjadi ajang "penggembengan" serius bagi para pimpinan legislatif daerah. Materi yang disajikan mencakup penguatan tugas, fungsi, dan peran DPRD dalam kesuksesan Asta Cita, hingga strategi memperkuat hubungan kelembagaan legislatif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Lebih jauh, para peserta juga dibekali isu-isu krusial

Baca **KETUA DPRD** Hal. 7

### CEGAH PERNIKAHAN DINI

## Pemkab Sigi Dorong Perda Kesehatan Reproduksi

**SULTENG RAYA** - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong implementasi peraturan daerah (Perda) terkait penyelenggaraan kesehatan reproduksi (Kespro) untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di daerah tersebut.

"Jadi perda tersebut sangat penting untuk dilaksanakan sebab kesehatan reproduksi memiliki peran dalam menentukan kualitas dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sigi," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Be-

Baca **CEGAH** Hal. 7



SEKRETARIS Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat (kiri) bersama Wakil Ketua DPRD Sigi Ikra Ibrahim (kanan) usai menandatangani perda penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi di Kabupaten Sigi, Sulteng, Kamis (16/4/2026). FOTO: ANTARA/MOH SALAM

## Warga Desa Sumoli Terima Bantuan Sosial

**SULTENG RAYA** - Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, Satuan Binmas (Sat Binmas) Polres Tojo Una-Una melaksanakan aksi sosial dengan menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Jumat (17/4/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh KBO Binmas Aiptu Sempo bersama Ps. Kaur Mintu Aipda Naek Sihotang, S.H. Secara door to door, personel mendatangi kediaman warga, diantaranya Salimah, Yuli, dan Hamdan, untuk menyerahkan bantuan paket sembako.

Kasat Binmas, AKP Agus Habibie, menyampaikan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk hadir di tengah kesulitan masyarakat.

"Pemberian bantuan sosial ini adalah bentuk empati dan kepedulian kami dari Polres Touna ke-

pada warga yang membutuhkan. Fokus kami adalah masyarakat yang benar-benar kurang mampu agar bantuan ini tepat sasaran," ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa meskipun bantuan yang diberikan mungkin terlihat sederhana, pihaknya berharap hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi rumah tangga penerimanya.

"Kami menyadari kondisi ekonomi saat ini cukup menantang bagi sebagian warga. Oleh karena itu, kegiatan ini kami laksanakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di wilayah Desa Sumoli," tambahnya.

Aksi kemanusiaan ini pun mendapatkan sambutan hangat dari warga. Kehadiran personel Sat Binmas di lapangan tidak hanya sekadar memberikan bantuan fisik, tetapi juga mempererat silaturahmi dan membangun kedekatan emosional antara kepolisian dengan masyarakat setempat. **AMR**



**PERSONEL** Satbinmas Polres Touna, saat menyerahkan bansos kepada warga kurang mampu di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna, Jumat (17/4/2026). FOTO: IST

## Mahasiswa Teknik Untad Dilatih Mitigasi Bencana

**SULTENG RAYA** - Universitas Tadulako (Untad) Palu melaksanakan kegiatan pelatihan mitigasi bencana yang bertempat di Fakultas Teknik dengan menghadirkan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palu sebagai narasumber, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 88 orang mahasiswa dari Program Studi Teknik Arsitektur.

Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teori terkait kebencanaan, namun juga mengikuti simulasi langsung yang dipandu oleh instruktur dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu.

Melalui pendekatan praktik, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai teknik dasar penanganan darurat, termasuk metode evakuasi dan pengangkutan korban yang tepat dalam situasi bencana. Hal ini bertujuan agar peserta memiliki keterampilan dasar yang dapat diterapkan saat menghadapi kondisi darurat di lingkungan sekitar.

Instruktur dari Basarnas Palu, Arifuddin, S.E., M.A.P. menegaskan pentingnya edukasi mitigasi bencana bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Palu yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

"Mitigasi bencana sangat penting untuk terus disosialisasikan. Kita memang tidak mengharapkan terjadinya bencana, namun upaya antisipasi harus tetap dilakukan. Minimal masyarakat memahami teknik dasar pertolongan darurat, seperti cara pengangkutan korban, sehingga dapat memberikan bantuan awal sebelum bantuan medis tiba," ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta peran aktif mahasiswa dalam menghadapi potensi bencana di lingkungan sekitarnya. **AMR**



**SEJUMLAH** mahasiswa mempraktikkan penanganan korban bencana, saat pelatihan mitigasi bencana yang dilaksanakan di Fakultas Teknik Untad oleh Basarnas Palu, Kamis (17/4/2026). FOTO: HUMAS BASARNAS PALU



**KEPALA** Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C. Soriton berfoto bersama disel-sela audiensi dengan pihak Ombudsman Sulteng, dalam upaya memperkuat zona integritas, Kamis (16/4/2026). FOTO: HUMAS BKKBN SULTENG

## BKKBN Sulteng Gandeng Ombudsman, Perkuat Zona Integritas

**SULTENG RAYA** - Audiensi antara Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan sebagai upaya penguatan pelayanan publik serta persiapan penilaian menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kualitas tata kelola pelayanan publik yang semakin baik dan bebas dari maladministrasi.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, menyampaikan, pertemuan ini merupakan momentum penting untuk memperoleh arahan, masukan, serta pen-

guatan dari Ombudsman dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa BKKBN Sulteng saat ini telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta mempertahankan sertifikasi ISO selama empat tahun berturut-turut, dan tengah mempersiapkan diri menuju WBBM.

"Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan bahwa langkah yang kami lakukan sudah berada pada jalur yang tepat. Kami juga terus mendorong inovasi pelayanan, baik melalui layanan konsultasi berbasis online maupun perluasan jam layanan agar lebih terjangkau masyarakat," ujar Tenny.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor men-

jadi kunci dalam penguatan pelayanan publik, salah satunya melalui program "Selasa Menyapa" yang diikuti ratusan peserta sebagai sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Iqbal Andi Magga, menegaskan bahwa pengawasan pelayanan publik merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari indikator nasional dalam mengukur kualitas pelayanan serta mendukung iklim investasi daerah.

Ia menjelaskan bahwa BKKBN termasuk dalam cakupan objek pengawasan pelayanan publik tahun 2026, meskipun saat ini terd-

apat prioritas pada sektor lain seperti lembaga pemasyarakatan dan imigrasi yang memiliki tingkat laporan masyarakat lebih tinggi. Namun demikian, koordinasi dan konsultasi tetap dapat dilakukan secara intensif guna mempersiapkan penilaian secara optimal dan mencegah potensi maladministrasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara BKKBN dan Ombudsman sebagai mitra strategis dalam pengawasan pelayanan publik, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas layanan serta mendukung terwujudnya predikat WBBM dan pelayanan yang semakin prima kepada masyarakat. **AMR**



**TIM** dosen menyerahkan kotak peralatan P3K kepada pihak SMP Tanantovea, Kabupaten Donggala, usai pelaksanaan penyuluhan tentang HIV/AIDS di sekolah tersebut, belum lama ini. FOTO: DOK. POLTEKKES PALU

## Poltekkes Palu Edukasi Siswa SMP Tanantovea Tentang HIV/AIDS

**SULTENG RAYA** - Puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tanantovea, Kabupaten Donggala mengikuti penyuluhan tentang HIV/AIDS dari Tim dosen Poltekkes Kemerkes Palu yang merupakan wujud dari pengabdian kepada masyarakat, belum lama ini.

Edukasi tersebut dipimpin Ketua Tim, Dr. Helena Pangaribuan, S.Kep., Ns., M.Kep, bersama anggota tim Baiq Emy Nurmalisa, S.Kep., Ns., M.Kep, dan Inang, Amd.Keb. Penyuluhan ini mengusung metode Aku Bangsa Aku Tahu (ABAT) sebagai pendekatan edukasi bagi remaja dalam memahami HIV/AIDS.

Dihadapan siswa SMP Tanantovea, tim menyampaikan pemahaman mengenai HIV, mulai dari cara penularan, pencegahan hingga pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sejak usia remaja.

Ketua tim, Dr. Helena Pangaribuan, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan yang benar kepada siswa tentang HIV/AIDS agar mereka memiliki pemahaman sejak dini. "Tujuan utama kegiatan ini adalah

memberikan pemahaman kepada siswa sejak dini mengenai HIV/AIDS, mulai dari cara penularan, pencegahan, hingga pentingnya menjaga perilaku hidup sehat," ujarnya.

Para siswa juga diberikan penjelasan mengenai berbagai cara penularan HIV, diantaranya melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu seperti darah, cairan sperma, cairan vagina, serta ASI dari ibu yang terinfeksi.

Selain itu, kata Helena, HIV juga dapat menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman serta penggunaan jarum suntik secara bersama-sama yang berisiko memindahkan darah yang terkontaminasi virus.

Dia menjelaskan, edukasi mengenai HIV sangat penting diberikan kepada siswa SMP karena mereka berada pada fase remaja awal yang rentan terpengaruh berbagai informasi dari lingkungan maupun media sosial.

"Kami menyampaikan materi melalui presentasi, video edukasi, serta alat peraga. Selain itu juga dilakukan sesi tanya jawab agar siswa lebih aktif dan berani bertanya," ujarnya.

Selain itu, para siswa juga diedukasi mengenai peran remaja dalam pencegahan HIV/AIDS. Para siswa diingatkan pentingnya menjaga pergaulan yang sehat dengan memilih lingkungan dan teman yang membawa pengaruh positif agar terhindar dari perilaku yang berisiko terhadap kesehatan.

Mereka juga didorong untuk berani menolak berbagai perilaku berisiko seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba, serta tindakan berbahaya lainnya sebagai bentuk perlindungan diri. Siswa diminta untuk aktif mencari informasi dari sumber yang terpercaya agar tidak mudah percaya pada mitos atau informasi yang salah terkait HIV/AIDS.

Selama kegiatan berlangsung, para siswa terlihat antusias mengikuti penyuluhan dan aktif mengajukan berbagai pertanyaan terkait HIV/AIDS dan kesehatan remaja. Ia berharap melalui kegiatan edukasi tersebut, para siswa dapat memahami informasi yang benar tentang HIV/AIDS serta menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. **AMR**

# Honda Sulteng Kembali Hadirkan Vario125 Night Ride Vol. 2

## SATUKAN KOMUNITAS DALAM PENGALAMAN BERKENDARA MALAM



PARA pecinta sepeda motor Honda dari berbagai komunitas di Kota Palu saat berpose bersama dalam kegiatan komunitas bertajuk "Vario125 Night Ride Vol. 2" pada Sabtu (11/4/2026). FOTO: HONDA SULTENG

**SULTENG RAYA** – Anugerah Perdana selaku Main Dealer sepeda motor dan suku cadang Honda di Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali menyelenggarakan kegiatan komunitas bertajuk "Vario125 Night Ride Vol. 2" pada Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan pengalaman berkendara malam yang menyatukan para pecinta sepeda motor Honda dari berbagai komunitas di Kota Palu dengan semangat "Time To Step Up." Kegiatan diawali dengan

berkumpulnya para peserta yang terdiri dari komunitas Honda aktif di halaman parkir Dealer Honda Anugerah Perdana Yos Sudarso Palu. Selanjutnya, peserta melakukan city rolling atau night ride menuju beberapa

landmark Kota Palu.

Nuansa malam Kota Palu yang tenang dan syahdu memberikan pengalaman berkendara yang berbeda, sekaligus mencerminkan gaya hidup berkendara yang modern, aman, dan penuh kebersamaan. Puluhan sepeda motor matic Honda turut memeriahkan kegiatan ini dengan tampilan yang mencerminkan karakter masing-masing pengendaranya. Tidak hanya sekedar night ride, kegiatan ini juga menjadi ajang interaksi antar komunitas melalui berbagai

aktivitas seperti games, mini challenges, serta sosialisasi keselamatan berkendara (safety riding). Rangkaian kegiatan tersebut semakin mempererat kebersamaan serta membangun suasana yang hangat dan meriah di antara para peserta. Antusiasme peserta terlihat tidak hanya saat berkendara, tetapi juga dalam momen berbagi cerita dan pengalaman, yang memperkuat silaturahmi antar komunitas motor Honda di Kota Palu. Rionald, PIC Community Anugerah Perdana,

menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah positif bagi komunitas untuk menyalurkan passion di dunia otomotif. "Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang aktualisasi diri bagi komunitas motor Honda, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan passion mereka dalam dunia otomotif secara positif. Dan kami berharap melalui kegiatan silaturahmi ini, kami dan komunitas motor Honda yang ada di Kota Palu dapat terus bersinergi dalam berbagai kegiatan positif lainnya," ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Honda dalam mendorong kolaborasi antara pelaku industri, komunitas, dan masyarakat dalam membangun ekosistem sosial yang aktif, inklusif, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Honda Sulteng akan terus berupaya memperkuat peran komunitas, tidak hanya sebagai pengguna sepeda motor, tetapi juga sebagai bagian dari pelaku perubahan yang mendorong budaya keselamatan berkendara, etika sosial, serta pengembangan kreativitas generasi muda.

Melalui semangat Satu Hati, Honda ingin terus menghadirkan kegiatan yang tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga memberikan nilai lebih bagi komunitas, sekaligus menegaskan bahwa Honda tidak hanya menemani perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan semangat dan nilai-nilai kehidupan bagi para penggunanya. **YAN**

## Peduli Kemanusiaan, Personel Brimob Donor Darah di RSUD Morowali



PERSONEL Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulteng, saat melaksanakan donor darah di RSUD Kabupaten Morowali, Senin (13/4/2026). FOTO: DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

**SULTENG RAYA** - Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan aksi nyata di bidang kemanusiaan, personel Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulteng melaksanakan donor darah di RSUD Kabupaten Morowali, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan guna membantu pasien yang tengah menjalani perawatan medis dan membutuhkan suplai darah. Selain untuk menambah stok darah di rumah sakit, aksi ini juga merupakan wujud kehadiran Brimob dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Morowali.

Danyon C Pelopor, Kompol Dimas Putra Kembaran, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah instruksi langsung untuk selalu sigap dalam membantu kesulitan masyarakat, tidak hanya dalam hal pengamanan, tetapi juga dalam urusan kemanusiaan.

"Kegiatan donor darah ini sebagai wujud rasa empati kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kami berharap kantong-kantong darah yang terkumpul hari ini dapat bermanfaat bagi keselamatan pasien yang membutuhkan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, personel menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis RSUD Morowali sebelum melakukan pengambilan darah. Semangat keikhlasan tampak jelas dari para personel yang antusias mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari dedikasi tanpa batas kepada bangsa dan negara.

Pihak RSUD Kabupaten Morowali menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari Satbrimobda Sulteng. Kehadiran personel Brimob dinilai sangat membantu ketersediaan stok darah yang seringnya menipis di tengah tingginya kebutuhan pasien. **YAT**

## Personel Brimob Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Desa Saojo

**SULTENG RAYA** - Merespon cepat terjadinya bencana banjir akibat intensitas curah hujan yang melanda Desa Saojo, Kecamatan Pamona Utara, personel Siaga SAR Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Sulteng segera diterjunkan ke lokasi terdampak untuk memberikan bantuan darurat kepada masyarakat, Ahad (12/4/2026).

Setibanya di lokasi, personel langsung bergerak menyisir rumah-rumah warga. Dengan sigap, petugas membantu mengevakuasi barang-barang berharga milik warga ke tempat yang lebih aman guna meminimalisir kerugian materiil akibat luapan air yang masuk ke dalam pemukiman.

Selain fokus pada evakuasi barang, personel Siaga SAR juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalur utama yang ter-



PERSONEL Siaga SAR Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Sulteng, saat diterjunkan ke lokasi terdampak untuk memberikan bantuan darurat kepada masyarakat, Ahad (12/4/2026). FOTO: DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

endam banjir. Guna mencegah kendaraan terperosok atau terjebak dalam genangan

yang cukup dalam, personel memasang tanda pembatas pada ruas jalan yang

tertutup air, sehingga para pengendara dapat melintas dengan aman melalui panduan personel di lapangan.

"Kehadiran personel Kompi 4 Batalyon B di Desa Saojo merupakan wujud nyata respons cepat Satbrimob Polda Sulteng terhadap bencana alam. Fokus utama kami adalah membantu warga mengamankan harta benda serta memastikan akses jalan tetap bisa dilalui dengan aman meskipun terendam banjir," tegas Danyon B Pelopor, Kompol Dr. Robi Utomo. Aksi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata dari bakti Brimob untuk masyarakat, di mana personel selalu siap sedia hadir di tengah kesulitan warga. Selain membantu evakuasi, tim SAR juga terus memantau perkembangan debit air di lokasi guna mengantisipasi adanya potensi banjir susulan. **YAT**

## LPKA Palu Terima 27 Narapidana Pindahan Rutan Palu-Donggala



PETUGAS LPKA Palu saat memeriksa badan narapidana pindahan dari Rutan Palu dan Rutan Donggala, Senin (13/4/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

**SULTENG RAYA** - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu menerima sebanyak 27 narapidana berusia 20 tahun (kategori remaja) yang merupakan pindahan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Palu dan Donggala.

Pemindahan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi overkapasitas yang terjadi di Rutan. Saat ini, jumlah hunian di LPKA Palu tercatat sebanyak 18 orang anak binaan. Kegiatan penerimaan dilaksanakan dengan pengawasan ketat serta melalui serangkaian proses pemeriksaan awal yang bertujuan untuk memastikan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, serta kesiapan mereka dalam mengikuti program pembinaan di lingkungan LPKA Palu, Senin (13/4/2026).

Proses penerimaan dipimpin langsung oleh Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (Kasubsi Adm. Wasgakin), Hery, bersama petugas jaga. Setibanya di LPKA Palu, para narapidana langsung menjalani tahapan pemeriksaan awal yang meliputi verifikasi

berkas administrasi guna memastikan kelengkapan dan keabsahan data.

Selain itu, petugas medis juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik masing-masing anak binaan sebagai langkah awal dalam pemberian layanan kesehatan yang tepat selama masa pembinaan.

Kasubsi Adm. Wasgakin, Hery, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. "Selama kegiatan berlangsung, situasi di LPKA Kelas II Palu terpantau aman dan terkendali tanpa adanya gangguan berarti," ujarnya.

Tidak hanya itu, pemeriksaan urine turut dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan LPKA Palu tetap bersih dari narkoba serta mendukung proses pembinaan yang optimal.

Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan badan

dan barang bawaan guna memastikan tidak ada benda terlarang yang masuk ke dalam area LPKA. Proses ini dilakukan secara humanis dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap anak.

Kepala LPKA Kelas II Palu, Welli, menegaskan bahwa setiap proses penerimaan akan selalu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, serta pembinaan yang berkelanjutan.

"Penerimaan narapidana pindahan dari Rutan juga menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi overkapasitas. Dengan pemindahan tersebut, diharapkan distribusi warga binaan dapat lebih merata sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal," jelasnya.

Melalui serangkaian pemeriksaan dan penyuaian awal ini, diharapkan para narapidana remaja dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru serta siap mengikuti berbagai program pembinaan dan pendidikan yang telah disiapkan oleh LPKA Palu. **YAT**



# Saudi Akan Denda Hampir Setengah Miliar Bagi Fasilitator Jamaah Haji Ilegal



Jamaah calon haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). Foto: Antara

SULTENG RAYA - Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Selasa (14/4/2026) resmi mengumumkan sanksi berat bagi individu yang nekat melaksanakan ibadah haji tanpa izin (tasrih), serta pihak-pihak yang memfasilitasi pemegang visa kunjungan untuk berhaji secara ilegal.

Aturan ini diberlakukan guna memastikan kelancaran ibadah haji dan keselamatan jamaah resmi. Dilansir dari Saudi Gazette, sanksi tersebut akan mulai berlaku pada 1 Dzulqaidah atau bertepatan dengan 18 April 2026 hingga berakhirnya musim haji pada 14 Dzulhijjah mendatang.

Beberapa poin hukuman bagi pelanggar haji:

- Haji tanpa izin: Denda maksimal sebesar SR 20.000 (sekitar Rp 85 juta) akan dijatuhkan kepada

individu yang tertangkap melakukan atau mencoba melakukan haji tanpa izin. Sanksi serupa berlaku bagi pemegang semua jenis visa kunjungan yang nekat masuk atau tinggal di Makkah dan wilayah suci selama periode terlarang (18 April - 14 Dzulhijjah).

- Penyedia fasilitas dan akomodasi: Denda maksimal SR 100.000 (sekitar Rp 425 juta) akan dijatuhkan bagi siapa pun yang membantu memfasilitasi, memberi tempat tinggal, atau

menyediakan transportasi bagi pemegang visa kunjungan ilegal untuk berhaji. Nilai denda ini akan berlipat ganda sesuai dengan jumlah individu yang dibantu atau disembunyikan.

- Deportasi dan cekal: Warga pendatang (ekspatriat) atau pemegang visa yang melanggar aturan ini akan dideportasi ke negara asal dan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun.
- Penyitaan kendaraan: Pengadilan berwenang dapat memutuskan penyitaan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jemaah ilegal jika kendaraan tersebut milik pihak yang memfasilitasi atau kakitangannya.

**HAK BANDING DAN PELAPORAN**  
Kementerian menyatakan bahwa individu yang dijatuhi sanksi memiliki hak

untuk mengajukan keberatan kepada komite yang berwenang dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan keputusan. Selain itu, banding dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha dalam waktu 60 hari.

Pemerintah Arab Saudi mendesak seluruh warga negara, ekspatriat, dan pengunjung untuk mematuhi peraturan yang berlaku demi menjaga kesucian dan ketertiban ibadah haji. Masyarakat juga diminta melaporkan adanya pelanggaran melalui nomor darurat 911 di wilayah Makkah.

**WASPADA PENIPUAN**  
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), An'im Falahuddin meminta umat Islam agar tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan haji menggunakan visa foruda pada tahun ini. Hal ini disampaikan Kiai

An'im, sapaan akrab An'im Falahuddin menanggapi keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji foruda di tahun 2026 bagi calon jemaah dari seluruh dunia.

"Keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji foruda harus kita hormati. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan ajakan atau penawaran berangkat haji tahun ini menggunakan visa foruda," ujar Kiai An'im dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Kiai An'im menjelaskan, selama ini visa haji foruda kerap menjadi pilihan sebagian masyarakat karena memungkinkan berangkat haji tanpa harus menunggu antrean panjang.

Di Indonesia, masa tunggu haji reguler bahkan bisa mencapai puluhan tahun,

sehingga skema foruda sering dianggap sebagai jalan pintas.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tahun ini berbeda. Dengan tidak diterbitkannya visa haji foruda oleh Pemerintah Arab Saudi, maka seluruh tawaran keberangkatan haji menggunakan jalur tersebut patut dicurigai.

"Memang benar antrean haji yang panjang membuat masyarakat mencari alternatif seperti foruda. Tapi untuk tahun ini, ketika visa tersebut tidak diterbitkan, maka setiap penawaran haji foruda harus diwaspadai. Jangan sampai masyarakat tertipu iming-iming keberangkatan haji instan," jelas dia.

Legislator asal Jawa Timur ini juga menekankan bahwa Pemerintah Arab Saudi harus mengeluarkan visa haji resmi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Indonesia sendiri membebankan jemaah melalui jalur haji reguler dan haji khusus yang seluruhnya menggunakan visa resmi dari otoritas Arab Saudi.

Lebih lanjut, Kiai An'im meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, untuk mengintensifkan sosialisasi terkait tidak adanya visa haji foruda tahun ini. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.

Selain itu, dia meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang masih menawarkan keberangkatan haji menggunakan visa Foruda pada tahun ini, karena itu jelas menyesatkan dan berpotensi merugikan masyarakat.

"Kami minta seluruh jamaah haji berhati-hati dengan segala macam penipuan," kata dia. **RRB**

## Pasukan Elite Israel Terjebak di Ibu Kota Perlawanan

SULTENG RAYA - Pertempuran jarak dekat yang sengit terus berkecamuk di pinggiran pasar tua Bint Jbeil, Lebanon Selatan, pada Selasa (14/4/2026). Pejuang perlawanan Lebanon terlibat kontak senjata intensif dengan pasukan elite pendudukan Israel yang berupaya menembus jantung kota tersebut.

Al Mayadeen melaporkan, meski Israel membombardir wilayah tersebut dengan serangan udara, artileri, dan pengebungan yang tanpa henti, pasukan darat mereka sejauh ini gagal mencapai terobosan yang menentukan.

Laporan lapangan mengonfirmasi bahwa pasukan penjajah belum mampu mencapai posisi kunci di dalam kota, termasuk Stadion Kota. Lokasi ini merupakan situs simbolis di mana mendiang Sayyid Hassan Nasrallah pernah menyampaikan pidato bersejarah pasca-pembebasan Lebanon Selatan tahun 2000, yang menyebut kekuatan Israel "lebih rapuh dari jaring laba-laba."



TENTARA Israel menghadiri pemakaman rekannya yang tewas di Gaza, di pemakaman militer Mount Herzl di Yerusalem, 27 April 2025. FOTO: EPA

**JEBAKAN MAUT BAGI PASUKAN ISRAEL**  
Dalam perkembangan terbaru, sebuah unit militer Israel dilaporkan terjebak dalam jebakan maut yang telah direncanakan oleh pejuang perlawanan. Pejuang Hizbullah menggiring unit tersebut ke dalam sebuah rumah sebelum meledakkan bangunan itu saat tentara berada di dalamnya.

Insiden ini diyakini sebagai "insiden keamanan" yang sebelumnya sempat dilaporkan oleh media-media Israel. Akibat kegagalan menembus poin-poin strategis, militer Israel kini dilaporkan membatasi pergerakan personel dan kendaraan guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

Sebagai gantinya, mereka mengandalkan kendaraan nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh untuk memantau

posisi pejuang perlawanan.

**PASUKAN PENJAJAH BERJATUHAN**  
Media Israel melaporkan, Komandan Batalyon 52 mengalami luka serius dalam pertempuran di Bint Jbeil pada Selasa. Selain itu, sejumlah besar tentara Israel dilaporkan menderita luka parah pada bagian anggota gerak (ekstremitas) serta cedera lainnya.

Sepanjang hari, helikopter militer Israel terlihat mendarat di berbagai rumah sakit untuk mengevakuasi prajurit yang terluka dari garis depan Lebanon. Sedikitnya, sepuluh tentara dari Batalyon 101 Brigade Pasukan Payung dilaporkan terluka dalam pertempuran jarak dekat semalam, dengan tiga di antaranya berada dalam kondisi kritis.

**BINT JBEIL: IBU KOTA PERLAWANAN**  
Bint Jbeil memegang posisi strategis dan simbolis yang

sangat krusial di Lebanon Selatan. Secara geografis, kota ini terletak di ketinggian yang mengawasi rute akses utama yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan pedalaman, seperti jalur Maroun al-Ras menuju Tyne (Sur). Selain kepentingan militer, Bint Jbeil dijuluki sebagai "Ibu Kota Perlawanan." Sejarahnya dalam menentang pendudukan telah bermula sejak masa Mandat Prancis pada 1936 hingga masa pendudukan Israel (1982-2000).

Status simbolisnya semakin menguat pada perang Juli 2006, di mana pertempuran di kota ini menjadi salah satu fragmen paling ikonik dalam sejarah konfrontasi Hizbullah dan militer Israel.

Bagi kedua belah pihak, Bint Jbeil bukan sekadar target operasional, melainkan simbol ketahanan dan harga diri dalam dinamika konflik di perbatasan Lebanon-Israel. **RRB**

## Pertamina Perkuat Keandalan Distribusi Energi melalui Digitalisasi Armada

SULTENG RAYA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Subholding Downstream Pertamina, terus memperkuat pengelolaan distribusi energi nasional melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui sistem monitoring armada kapal yang terintegrasi.

Pengelolaan sistem ini dilakukan melalui Command Centre di Kantor Pusat Pertamina yang menjadi pusat pemantauan operasional kapal secara harian, baik kapal milik maupun kapal charter.

Dari ruang ini, pergerakan armada dipantau secara menyeluruh, mulai dari posisi, kecepatan, hingga progres pelayaran di setiap rute distribusi. Melalui sistem berbasis data yang terintegrasi, pemantauan dilakukan secara real-time sehingga memberikan visibilitas yang lebih utuh terhadap pergerakan armada. Hal ini memungkinkan tim operasional untuk mengantisipasi potensi keterlambatan serta melakukan penyesuaian operasional secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, sistem monitoring juga dilengkapi dengan pengawasan berbasis CCTV yang terpasang di kapal. Snapshot CCTV dikirim secara berkala ke darat dan ditampilkan dalam dashboard operasional, sehingga aktivitas di kapal tetap dapat dipantau secara berkelanjutan. Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas distribusi energi di tengah dinamika operasional.

"Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, kami memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap pergerakan armada. Hal ini memungkinkan kami merespons dinamika operasional dengan lebih cepat serta menjaga ketepatan distribusi energi di berbagai wilayah," ujar Arif. Lebih lanjut, sistem ini dilengkapi dengan fitur alert dan reporting yang



Pertamina. FOTO: PERTAMINA

memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai kondisi operasional, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data. Digitalisasi juga turut mendorong transparansi dalam pengelolaan distribusi energi, termasuk melalui pemanfaatan sistem monitoring yang dapat diakses bersama dengan mitra kapal charter. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur fraud detection untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan operasional. Penguatan sistem ini didukung oleh implemen-

tasi Enhanced Daily Tanker Position (EDTP) 3.0 yang menghadirkan peningkatan stabilitas sistem serta integrasi data operasional yang lebih komprehensif.

Pemanfaatan fitur seperti geofencing dan integrasi data geografis, termasuk cuaca dan alur pelayaran, turut mendukung pengambilan keputusan operasional secara lebih akurat. Sistem ini juga terpacu oleh Pertamina Integrated Digital Command Center (PIDCC) atau Pertamina Hub, yakni pusat kendali digital terintegrasi yang mengonso-

lidasikan berbagai data operasional secara real-time dalam satu platform. Integrasi ini memungkinkan pemantauan armada secara menyeluruh dalam satu ekosistem yang terpusat, didukung oleh data visual dari CCTV di kapal untuk memperkuat visibilitas operasional. Tidak hanya memastikan kelancaran distribusi, sistem ini juga menjadi langkah antisipatif dalam mitigasi potensi penyimpangan serta risiko operasional di lapangan. Arif menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi ini tidak hanya berfokus pada aspek monitoring, tetapi juga memastikan distribusi energi dapat berjalan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan di berbagai wilayah.

"Pada prinsipnya, yang kami monitor bukan hanya pergerakan armada, tetapi juga memastikan energi dapat terus tersalurkan secara berkelanjutan dan dapat diandalkan bagi masyarakat di berbagai wilayah," tutup Arif. **RRB**

**BIRO PERJALANAN UMUM**  
**PT. MEDI SUKA LAKSANA (MSL TRAVEL)**

Dapatkan Promo Menarik Tujuan : Poso-Palu

1. Beli tiket 10 kali dengan nama sama dalam sebulan, GRATIS 1 kali pemberangkatan
2. Diberikan Fasilitas Sarapan/Makan Pagi untuk Penumpang
3. Melayani pengiriman paket Poso-Palu dengan aman



Segera hubungi :  
Agen Poso : 0812 9688 9876  
Agen Palu : 0813 9688 9877

**Biro Perjalanan Umum**  
**CV MITRATOUNA TRAVEL/BIS**  
**PALU-AMPANA**

**AGEN PERWAKILAN :**

**PALU** : Jl. Tombolotutu No.50-52  
Telp : (0451) 424347 - 4704707 - 427139

**AMPANA** : Jl. Tanjumbulu Bawah No. 9 (Dekat Tugu Ampana)  
Telp : 081252984112, 081252984116  
081243799363, 082122150777

Untuk yang beranggapan rental MOBIL LORENNNA akan mendapatkan FREE MINERAL WATER & SNACK  
7x Keberangkatan Palu-Talis gratis 1 tiket

**LORENNNA**  
TRAVEL, RENT & EXPEDITION

Toko Sempurna Baru  
Jl. Syarif Marzur No.111  
Talis  
Telp/WA: 0812 3333 2318

Cabang Palu:  
Jl. Juanda No. 78  
Telp: 0813 4124 2003  
WA : 0852 3256 2003



Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

**BIRO PERJALANAN UMUM**  
**PRIMA JAYA TRAVEL**

**PALU - POSO - TENTENA**  
**BUNGKU - KENDARI**

**PALU** : Jl. Hangtua No. 40  
Telp.: 082396625339

**BUNGKU (MOROWALI)** : Jl. Trans Sulawesi (Depan RSUD Morowali)  
Telp.: 085394579024

**KENDARI** : Terminal Puwatu  
Telp.: 082342677110



# Kebijakan Berdasarkan Kebutuhan (Siapa)?

**YANG** sekarang ramai dalam pemberitaan yaitu berita serangan diluncurkan, rudal dibalas, dan ketegangan meningkat antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan sederhana tapi mendasar muncul, sebenarnya ini kebijakan atau keputusan siapa?

**OLEH : HENDARMAN**

**A**PAKAH perang ini lahir dari satu tombol yang ditekan oleh sege-lintir elite di ruang tertutup? Ataukah ia merupakan hasil dari keputusan kolektif yaitu gabungan kepentingan negara, tekanan aliansi, dan kalkulasi politik yang saling bertumpuk? Fenomena dengan mempertanyakan kebijakan itu sebenarnya kebutuhan siapa juga dapat dianalogikan pada berbagai kebijakan sektor pembangunan belakangan ini.

Suatu hal yang dapat diamati di ruang publik adalah tanda tanya, polemik, dan diskursus. Protes dari target atau penerima kebijakan menjadi bukti. Pernyataan ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan mengisir interaksi dinamis dalam berbagai media sosial yang menggiring kepada pertanyaan kritis. Pertanyaan terkait dugaan adanya ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dimaksud di lapangan akibat persepsi yang tidak sama di antara mereka.

Yang menarik, para pembuat kebijakan cenderung menanggapi kendala implementasi dengan jawaban sederhana dan singkat tanpa menjelaskan dengan pasti faktor penyebab masalah. Juga terkadang tidak memberikan alternatif solusi segera untuk

mengatasi masalah. Yang mengkhawatirkan jawaban malah menyebabkan kecacauan berpikir publik. Juga inkonsistensi jawaban antara pejabat pmbuat pernyataan padahal mereka bersal dari institusi yang sama.

Padahal, teori dan literatur mengatakan bahwa kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan seyoginya dapat menjelaskan mengapa diperlukan, dan dampak akibat adanya kebijakan tersebut (Thomas R. Dye, 1981). Mustopadidjaja (2002) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan mencapai tujuan tertentu".

Hal yang sama dikatakan James Andersen bahwa kebijakan publik merupakan "A purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern" (serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu diterapkan seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan melalui proses panjang termasuk konsultasi atau dialog dengan public dilanjutkan ujicoba sudah sesuai dengan kebutuhan? Pertanyaan ber-

kutnya, kebutuhan siapa yang menjadi dasar penyusunan kebijakan tersebut? Apakah kebutuhan publik atau justru kebutuhan kelompok atau kepentingan tertentu (conflict of interest)?

## BEBERAPA FAKTA

Secara obyektif, harus diakui bahwa sebenarnya latar belakang beberapa kebijakan telah didasarkan atas permasalahan di lapangan sehingga ditujukan kepada segmen target tertentu. Beberapa kebijakan lain cenderung ajang pembuktian janji-janji politik atau sebagai solusi berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Di sisi lain, terdapat kebijakan yang cenderung digiring memenuhi kepentingan pihak atau kelompok tertentu. Kebutuhan tersebut dalam beberapa kenyataan cenderung karena adanya tuntutan kinerja sebagai wujud amanah yang diberikan. Juga kebutuhan bahwa kebijakan yang ada harus diubah agar ada bentuk "legacy" dalam era kepemimpinan tertentu.

Postulat sederhana, kalau masih tetap melanjutkan kebijakan yang lama ditengarai tidak visoner dan tidak mampu bekerja. Atau kebijakan mendadak ditetapkan dalam waktu cepat tanpa melalui suatu prosedur sesuai kaidah penyusunan peraturan yang berlaku. Karena yang menjadi urgen adalah program baru dan cenderung tidak mempertimbangkan secara matang dampak setelah diimplementasikan seperti kegaduhan bagi kepada publik.

Yang menarik, keluhan tidak segera dijadikan bahan evaluasi perbaikan. Tampaknya sejumlah kebijakan yang ada sekarang belum selaras dengan dua karakteristik kebijakan publik sebagaimana disampaikan Nugroho (2015).

Pertama, kebijakan publik seharusnya mudah untuk dipahami, karena dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, kebijakan publik mudah diukur, yakni sejauhmana diperoleh ketercapaian tujuan kebijakan.

Disamping itu ditengarai pembuatan kebijakan yang ada, masih belum mempertimbangkan tiga sifat umum kebijakan, yaitu kompleksitas, dinamis, dan sebagai keputusan. Kompleksitas dimaknai bahwa kebijakan publik itu terkait dengan banyak aspek, berwawasan luas, dan mengaitkan banyak pihak. Secara implisit menunjukkan bahwa kebijakan publik itu tidak bisa berurusan dengan satu kelompok atau komunitas saja.

Ia harus dikaitkan dengan keberadaan sejumlah komunitas yang akan menjadi target kebijakan. Dinamis diartikan bahwa kebijakan tidak bisa stagnan atau statis. Setiap kebijakan akan memiliki peluang untuk dipengaruhi baik dari faktor di luar (exogenous), faktor internal, dan konsekuensi kebijakan sebelumnya dalam bidang yang sama.

Harus dipahami bahwa kebijakan dapat berubah setiap waktu karena muncul hambatan dan ketidaksesuaian. Keputusan sebagai sifat ketiga dimaknai bahwa kebijakan publik seyoginya ditetapkan setelah melalui proses pemilihan yang terbaik di antara berbagai alternatif. Penetapan menimbulkan implikasi berupa aksi kebijakan atau rencana aksi sebagai tindak lanjut dalam tataran implementasi. Di samping itu, kebijakan walaupun pada hakekatnya bersifat konseptual, dalam proses perumusannya sudah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang operasional

## REKOMENDASI

Dalam perspektif kebijakan publik, perubahan seharusnya tidak dilakukan apabila belum terdapat cukup bukti kuat bahwa perubahan akan merugikan dari aspek efektivitas, efisiensi dan keberterimaan secara politik. Tanpa dasar konseptual yang jelas, kebijakan yang tidak didasarkan atas kajian atau spontanitas karena semata-mata ada "wangsit" justru dapat menimbulkan disfungsi baru.

Paling tidak ada dua rekomendasi untuk mengatasi "karut marut" nya kebijakan. Pertama, perlu dilakukan kajian akademik yang lebih mendalam terhadap sebuah rencana kebijakan. Proses ini akan berdampak kepada publik karena dapat merasakan kebijakan yang diambil memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat, serta menguntungkan dirinya.

Kedua, kebijakan seyoginya diposisikan sebagai gerakan kultural. Artinya, kebijakan bukan semata-mata digunakan sebagai instrumen kepentingan kelompok tertentu untuk mencapai tujuan. Sebuah kebijakan seyoginya bukan disusun untuk kepuasan bagi pembuat kebijakan semata-mata atau karena konflik kepentingan atau keuntungan yang diperoleh.

Kebijakan harus dipahami sebagai sebuah proses yang mempersyaratkan tahapan atau langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Muara adanya kebijakan adalah kemashlahatan bagi orang banyak sebagai target kebijakan. Penulis: *Ketua Tim Pakar JFAK INAKI (Ikatan Nasional Analisis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor. \*\*\*SindoNews.Com.*

## TAJUK



## Memuliakan Kebebasan Pers

**P**ERTEMUAN antara tokoh nasional Surya Paloh dan para pemimpin redaksi media nasional yang tergabung dalam Forum Pemred, tadi malam, menunjukkan komitmen kuat bahwa kebebasan pers wajib dijaga. Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.

Namun, kemuliaan itu bisa tergerus, bahkan tergelincir ke level yang rendah bila kebebasan dimaknai sebagai sikap bebas yang sama sekali tidak dilekatkan tanggung jawab. Itulah kebebasan yang kebablasan, yang justru merusak muruah kemuliaan pers.

Maka, komitmen menjaga kebebasan pers yang penuh dengan tanggung jawab tersebut menjadi amat relevan untuk diganggu saat ini. Apalagi, kita menyaksikan residu dari keterbukaan dan kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dan literasi yang cukup itu terbukti melahirkan banyak disinformasi, misinformasi, bahkan produksi dan reproduksi hoaks.

Surya Paloh sebagai tokoh pers yang pernah mendapatkan Bintang Mahaputra Utama (2015) dan Medali Kepeloporan (2024) atas idenya mendirikan Metro TV, televisi berita pertama 24 jam di Indonesia, tentu risau dengan kondisi seperti itu. Kerisauan yang sama disuarakan oleh Forum Pemred, yang dalam berbagai kesempatan mengajak publik untuk memerangi hoaks, disinformasi, dan misinformasi.

Kerisauan tersebut membentuk simpul yang sama sehingga sangat penting untuk terus-menerus disuarakan. Apalagi, indeks literasi media masyarakat Indonesia masih belum memuaskan kendati naik dari waktu ke waktu. Dalam skala 5, tingkat indeks literasi media bangsa ini masih di angka 3,4.

Terlebih lagi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jelas-jelas ditambalkan bahwa pers yang bertanggung jawab adalah pers yang menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan berlandaskan kaidah-kaidah jurnalistik.

Secara lebih konkret, definisi itu dapat dipahami dari beberapa prinsip dalam undang-undang berupa taat hukum dan norma; menjalankan fungsi pers; serta menjaga profesionalitas pers dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk, melakukan verifikasi sebelum publikasi, dan menghormati hak jawab serta hak koreksi.

Tanggung jawab berarti pula tidak menyalahgunakan kebebasan. Kebebasan pers dijamin, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab dengan tidak menyebarkan fitnah atau hoaks, menghasut, atau merugikan kepentingan umum.

Jadi, pers Indonesia hakikatnya adalah pers yang bebas, tetapi tetap tunduk pada hukum, etika jurnalistik, serta kepentingan publik, dengan mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam setiap pemberitaan.

Maka, spirit kembali memuliakan kebebasan pers dengan tanggung jawab penuh adalah keniscayaan. Apa yang disepakati Surya Paloh sebagai tokoh pers nasional dan Forum Pemred dalam silaturahmi dan halabihlah di NasDem Tower tidak hanya layak diapresiasi, tetapi juga niscaya menjadi gerakan bersama. *\*Media Indonesia*

## Penyimpangan Terkini Penerapan UU Tipikor Tahun 1999/2001

**PERJALANAN UU Nomor 31 Tahun 1999** pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 telah memasuki usia lebih dari 25 tahun tanpa ada perubahan sama sekali.

**OLEH : Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M**

**N**AMUN Putusan MKRI Nomor 123 tahun 2026 telah mengubah sama sekali pandangan semula bahwa UU Tipikor 1999 bukan merupakan "pukat harimau" menjadi dipertegas lagi justru merupakan "pukat harimau" oleh lembaga penjaga konstitusi yang notabene wajib melindungi hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 45, setiap orang berhak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di muka hukum.

Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 prinsip "tujuan menghalalkan cara" (het doel Heilig de middelen) dijadikan motif pembenaran bahwa ketentuan Pasal 14 UU Tipikor tidak mengandung kepastian hukum dengan menetapkan ketentuan baru atas Pasal 14:

setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana di dalam UU sektoral yang tidak disebut tegas sebagai tipikor; berlaku ketentuan pidana di dalam UU sektoral kecuali pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur tipikor maka diberlakukan UU Tipikor.

Penafsiran hukum oleh majelis hakim konstitusi ternyata tidak menggunakan salah satu dari 5 (lima) metode penafsiran hukum yang berlaku pada umumnya melainkan hanya didasarkan atas alasan tidak memenuhi kepastian hukum; sedangkan frasa, "kepastian hukum yang adil; tidak hanya kepastian hukum; telah diabaikan, sehingga tmenghapuskan Marwah MKRI sebagai penjaga Konstitusi UUD 45.

Penafsiran Majelis Hakim MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 yang bersifat terakhir dan mengikat seluruh lembaga negara

juga anggota masyarakat; telah menyamaratakan setiap kasus tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sekalipun tampaknya sama-sama tipikor karena memang analisis hukum pidana meteril tidak dapat dipersamakan dengan analisis konstitusional yang dilandaskan pada Konstitusi UUD 45 karena terdapat perbedaan fundamental antara kedua disiplin ilmu hukum tersebut (hukum pidana dan hukum tata negara).

Analisa hukum pidana didasarkan pada fakta yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana sedangkan analisa hukum tata negara didasarkan pada aspek konstitusionalitas dari suatu UU terhadap UUD. Pertimbangan Majelis MKRI bahwa, perlu disisipkan frasa "dikecualikan... dstnya pada ketentuan Pasal 14 UU Tipikor hanya dengan pertimbangan demi kepastian hukum merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena frasa ketentuan Pasal 14 UU Tipikor telah memenuhi syarat lex scripta, lex stricta, dan lex certa.

Adapun maksud dan tujuan pembentuk UU Tipikor 1999 khususnya ketentuan Pasal 14 adalah untuk men-

cegah agar penerapan UU Tipikor khusus ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dilakukan secara pukul rata

asalkan dipenuhi unsur tipikor Pasal 2 atau Pasal 3 tanpa mempertimbangkan kesalahan terdakwa. Alasan ketentuan Pasal 14 telah menimbulkan ketidakpastian hukum justru alasan tanpa dasar hukum yang jelas baik dari sudut doktrin hukum maupun yurisprudensi.

Sekalipun di dalam praktik peradilan tipikor, ketentuan Pasal 14 diabaikan baik oleh advokat maupun hakim. Dampak putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026, terbuka celah hukum baru bagi Kejaksaan dan KPK untuk tidak lagi mempertimbangkan keberadaan pelanggaran pidana di dalam UU Sektoral dan apriori mengenyampingkan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor yang notabene adalah muruah dan sekaligus berfungsi sebagai rambu pembatas penerapan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Implikasi hukum lebih jauh di dalam penerapan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor; tidak ada lagi perbedaan antara UU Sektoral (umum) dan UU Khusus Pidana (UU Tipikor) yang sejak

lama diakui baik di dalam teori, doktrin dan yurisprudensi perkara pidana.

Sedangkan di sisi lain, UU KUHP Pidana 2023 masih tetap membedakannya sebagaimana tercantum di dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus oleh karenanya, Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 telah bertentangan dengan pembaruan UU Pidana khususnya pembaruan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Sekalipun dalam praktik peradilan tipikor kemudian setelah Putusan MKRI tersebut, kejaksanaan atau KPK masih didasarkan Putusan MKRI aquo maka lembaga praperadilan yang akan menguji/menilai sejauh manakah praktik penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan atau KPK dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Pada akhirnya akan terjadi pertentangan antara sisi kepastian hukum dan keadilan dan menurut ketentuan Pasal 53 KUHP 2023, hakim wajib mengutamakan keadilan; bukan kepastian hukum.

Penulis: *Guru besar di bidang Ilmu Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran, \*\*SindoNews.Com.*

**TAG TRIMEDIA GROUP**

### PENERBIT:

PT. Trimedia Sulteng Mandiri  
No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri  
Acc. 001010770011, Rek.BSI No. 728273443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri  
Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6  
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI  
PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan  
(Ahmad Avenus Toana, Sudarsono, Syafiq, Agung Ramadhan)  
PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP  
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

**WARTAWAN HARIAN SULTENG RAYA, DIBEKALI KARTU PERS/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI**

**PENDIRI/PIMPINAN UMUM:** Tri Putra Toana. **DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA :** Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara. **PIMPINAN PERUSAHAAN:** Suyanto. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Irwan.

**REDAKTUR:** Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. **STAF REDAKSI:** Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. **SEKRETARIS REDAKSI:** Jane Lestari Parabak

**LITBANG:** A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. **BIRO DONGGALA:** Wahid Agus. **BIRO SIGI:** Feri Fadli. **BIRO PARMOUT:** Aslan Laeho. **BIRO TOUNA:** Budi. **BIRO POSO:** Syamsuyadi. **BIRO BALUT:** - **BIRO MOROWALI:** Intan. **BIRO MOROWALI UTARA:** Ivan Tagora. **BIRO TOLITOLI:** Rustam.

**BIRO BANGKAP:** Pariaman Tambunan (Kepala Biro). **BIRO BANGGAI:** Pariaman T. **DESIGN & ARTISTIK:** Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. **PEMASARAN/SIRKULASI:** Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. **KEUANGAN:** Febrianti.

**EMAIL:** sultengraya7h@gmail.com, sultengraya@gmail.com **TARIF IKLAN:** Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. **ALAMAT REDAKSI:** Jl. Rusa No. 36 **TLP:** 0451 4012 445 **ALAMAT PERCETAKAN:** Jl. Rusa No.36 Palau.

# Bulog Sulteng Kembali Banjiri Pasar dengan Stok Minyakita



STOK minyakita di pasar Manonda, Kota Palu. FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

SULTENG RAYA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah menyatakan, kembali mendistribusikan stok minyakita ke pasar-pasar pencatatan demi menstabilkan harga.

Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sulteng, Jusri mengatakan, intensitas pendistribusian sempat menurun karena stok dialihkan demi memenuhi penyaluran bantuan pangan di Sulteng.

"Memang pada Maret sampai awal April minggu

pertama agak lambat karena fokus untuk bantuan pangan, stok yang dibutuhkan cukup besar. Tapi kami mulai jalan sudah 10 hari kita sebar seluruh kabupaten dengan harapan menekan harga," kata Jusri kepada awak media, Jumat (17/4/2026).

Pada saat menurunnya intensitas penyaluran minyakita di pasar, diakuinya, harga sempat melambung. Namun dirinya meyakini dengan membantiri stok ke depan, harga akan kembali stabil.

"Kami harap bisa turun (harga minyakita, red) secepatnya. Khususnya wilayah-wilayah Kabupaten Morowali dan sekitarnya," kata Pimwil Jusri.

Dia mengimbau kepada seluruh pedagang, khususnya yang bermitra dengan Bulog agar tunduk terhadap aturan main penjualan minyakita yakni Rp15.700 per liter. Pihaknya tidak segan untuk menindak pedagang nakal yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Kami akan intens melakukan pengawasan. Kami ingin semua menjual sesuai dengan regulasi agar harga

ke konsumen bisa sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, gerakan stabilisasinya juga bisa dapat

sesuai amanat Pemerintah," tutup Pimwil Jusri. Untuk diketahui, Bulog Kanwil Sulteng kini memi-

liki sebanyak 1,16 juta liter yang tersebar di satu kanwil dan 3 kancab di Sulawesi Tengah. ■■■

## OJK dan Kementerian Ekraf Perkuat olaborasi Pengembangan Inovasi Keuangan Digital

SULTENG RAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan inovasi keuangan digital berbasis Web3 guna mendukung penguatan sektor ekonomi kreatif.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan strategis kedua lembaga di Kantor Ekraf Jakarta, Selasa, yang menjadi langkah penting dalam mendorong transformasi kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) Indonesia menjadi kelas aset baru yang bernilai ekonomi tinggi.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarmo dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen OJK dalam mendukung pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan melalui sinergi yang berkelanjutan dengan Ekraf.

"Kolaborasi antara OJK dan Ekraf mencerminkan sinergi strategis yang berkelanjutan dalam mendorong terciptanya inovasi baru di sektor keuangan digital," kata Adi Budiarmo dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Jumat (17/4/2026).

Lanjutnya, implementasi kerja sama tersebut antara



PERTEMUAN OJK dan Kementerian Ekraf. FOTO: DOK. OJK

lain diwujudkan melalui program Infinity Hackathon OJK-Ekraf 2025 dan Infinity Accelerator 2026. Infinity Hackathon OJK-Ekraf 2025 telah menghasilkan berbagai solusi inovatif berbasis Web3 di bidang pembiayaan, transparansi, dan perlindungan karya kreatif.

Sementara itu, Infinity Accelerator 2026 yang mengusung tema Unlocking Indonesia's Intellectual Property as a New Asset Class diarahkan untuk mendorong transformasi kekayaan intelektual Indonesia menjadi kelas aset baru yang terverifikasi, terdigitalisasi, dan layak investasi. Program ini juga menjembatani peman-

faatan teknologi blockchain dengan kebijakan sektor keuangan guna mendukung terciptanya pasar kekayaan intelektual yang lebih likuid dan kredibel.

"Melalui kesinambungan program Infinity Hackathon dan Infinity Accelerator, OJK berkomitmen memperkuat ekosistem inovasi berbasis Web3 dan blockchain guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di era transformasi digital," kata Adi Budiarmo.

Hal ini disambut baik oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. "Transformasi kekayaan intelektual menjadi kelas aset baru merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia. Melalui kolaborasi dengan OJK, kami ingin memastikan bahwa inovasi berbasis Web3 tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi para kreator dan pelaku industri," kata Teuku Riefky Harsya.

Dalam pertemuan tersebut, OJK dan Ekraf juga

menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan terkait teknologi blockchain, aset kripto, serta model pembiayaan berbasis digital di sektor ekonomi kreatif.

Kolaborasi yang dilakukan juga diharapkan dapat mempercepat transformasi ekosistem ekonomi kreatif Indonesia menuju era digital yang inklusif, transparan, dan berdaya saing global, sekaligus membuka peluang baru dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnianto, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Ekraf Muhammad Neil El Himam, dan perwakilan dari startup peserta program Infinity Hackathon dan Infinity Accelerator. Tiga startup yang menjadi bagian dari ekosistem inovasi, yaitu Libere, Invisible Funds, dan Alterfun juga melakukan presentasi model inovasi pada pertemuan dimaksud. ■■■

## Sudah Tak Ada Matahari di Indonesia

SULTENG RAYA - Pemegang saham PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT MDS Retailing Tbk. Perubahan nama ini diputuskan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (15/4).

Berdasarkan risalah RUPSLB, persetujuan nama baru perseroan dilakukan karena adanya perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama Perseroan. Perubahan ini disetujui oleh 1.588.241.118 saham atau sekitar 93,181% dari seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.

"Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Matahari Department Store Tbk menjadi PT MDS Retailing Tbk," tulis ringkasan risalah RUPSLB LPPF dari Keterbukaan Informasi, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, pemegang saham LPPF juga menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (saham treasury) melalui penarikan kembali sejumlah 31.000.000 saham. Adapun seluruh saham ini merupakan hasil buyback yang dilakukan hingga 09 April 2026 dengan skema penurunan modal ditempatkan dan disetor.

Dalam kesempatan yang sama, LPPF juga melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Berdasarkan hasil tersebut, pemegang saham perseroan juga menyetujui pembagian dividen tunai final dari laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp 250 per saham.

"Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB," pungkasnya. ■■■



FOTO: DOK. MATAHARI.COM

## Relawan MBG Wajib Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

SULTENG RAYA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan perlindungan sosial bagi tenaga relawan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh mitra dan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga relawan mereka ke program BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah III, Ranto mengatakan mitra dan yayasan SPPG diwajibkan menjalankan proses operasional iuran BPJS Ketenagakerjaan secara tertib dan berkelanjutan. Ia menekankan perlindungan kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional program MBG.

"Mitra dan yayasan berkewajiban mendaftarkan setiap tenaga relawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja yang melekat pada pelaksanaan program MBG," ujar Ranto dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan yayasan dan mitra sebagai pengelola SPPG memiliki tanggung jawab penuh terhadap

administrasi pelaksanaan. Ranto juga meminta agar yayasan serta mitra dapat memastikan pembayaran hak tenaga relawan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Saat ini, tercatat 5.322 SPPG dengan total 278.614 relawan secara nasional belum terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Saat ini secara nasional tercatat sebanyak 5.322 SPPG dengan total 278.614 relawan belum terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara di Wilayah III, sebanyak 3.015 SPPG telah memiliki nomor registrasi kepesertaan, sementara 249 SPPG lainnya belum terdaftar," tambah Ranto.

Di tingkat daerah, Provinsi Maluku misalnya, menunjukkan angka yang baik. Dari 55 SPPG yang teridentifikasi, sebanyak 52 SPPG atau 94,55% sudah resmi terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Sementara itu, masih terdapat 3 SPPG atau 5,45 persen yang belum terdaftar dan perlu segera ditindaklanjuti," jelas Ranto. ■■■



# Pertamina Sulawesi Dorong Pencegahan Stunting Lewat Edukasi Gizi

**SULTENG RAYA** - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal (IT) Kendari menggelar sosialisasi gizi bagi balita dan anak di Posyandu Permata Indah, Kelurahan Mata. Kegiatan ini menyasar para ibu sebagai garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di tingkat masyarakat.

Sosialisasi menghadirkan petugas gizi dari Puskesmas Mata, Sugiati, yang menyampaikan materi terkait pentingnya gizi seimbang, pemilihan bahan pangan yang tepat, serta praktik pemberian makan yang mendukung tumbuh kembang optimal anak. Edukasi diberikan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, dengan partisipasi aktif para peserta yang berbagi pengalaman sekaligus mencari solusi atas tantangan pemenuhan gizi sehari-hari.

Sebagai tindak lanjut, Pertamina turut menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak yang teridentifikasi mengalami stunting. Langkah ini menjadi bagian dari intervensi langsung untuk membantu perbaikan status gizi sekaligus mempercepat penanganan di lapangan.

Lurah Mata, Sarna, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam



**PERTAMINA** Patra Niaga Regional Sulawesi menggelar sosialisasi gizi bagi balita dan anak di Posyandu Permata Indah, Kelurahan Mata, Kota Kendari. **Foto: IST**

## VOLCANO dari halaman .....

Dari Palu, sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam, gagasan itu dipantik. Bukan hanya menjual buah, tetapi membangun citra. Sebab di balik rasa durian Indonesia, ada cerita panjang tentang tanah, alam, dan warisan.

Indonesia, kata Aditya, adalah bagian dari cincin api dunia — wilayah dengan tanah vulkanik yang subur dan kaya mineral. Dari situlah keunggulan itu lahir: rasa durian yang lebih kuat, kompleks, dan alami.

"Ini bukan sekadar durian. Ini adalah durian yang lahir dari tanah vulkanik Indonesia. Lahir dari Ibu

Pertiwi, disempurnakan oleh alam," ujarnya, menegaskan filosofi di balik nama Volcano Durian Indonesia.

Brand ini diharapkan menjadi wajah baru durian Indonesia di mata dunia — sebuah simbol kekuatan alam nusantara yang unik sekaligus berdaya saing tinggi di pasar internasional.

Dukungan pun mengalir dari daerah. Ketua Kadin Kabupaten Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, melihat peluncuran ini sebagai momentum penting untuk menyatukan langkah para pelaku usaha.

Ia mengajak seluruh pengusaha, khususnya pengelola packing house durian, untuk menggunakan logo Volcano Durian Indonesia sebagai identitas bersama.

Menurutnya, kekuatan kolektif akan menjadi kunci untuk menembus pasar global yang semakin kompetitif.

"Ini bukan hanya tentang branding, tetapi tentang kebersamaan kita. Dengan satu identitas, kita akan lebih kuat, lebih dipercaya, dan lebih siap bersaing," tegasnya.

Apresiasi juga ia sampaikan kepada pemerintah dan APDURIN yang dinilai

konsisten mendorong pertumbuhan sektor durian, baik di Sulawesi Tengah maupun secara nasional.

Peluncuran ini bukan garis akhir, melainkan titik awal. Sebuah gerakan nasional yang diharapkan mampu menyatukan identitas, meningkatkan nilai tambah ekspor, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam peta durian dunia.

Dari tanah vulkanik yang subur, kini Indonesia tak hanya mengirim durian — tetapi juga mengirimkan cerita, identitas, dan kebanggaan ke seluruh penjuru dunia. **ANT**

## TELUSURI dari halaman .....

nai proyek musala itu tak lagi sekadar percakapan terbatas, melainkan telah menjadi perhatian luas masyarakat.

"Banyaknya pemberitaan soal musala Inspektorat Parigi Moutong, makanya kami masuk untuk melakukan pulbaket," katanya.

Namun, di tengah sorotan tersebut, Kejari menegaskan tetap berjalan di rel profesionalitas. Pulbaket, kata Rony, bukanlah vonis, melainkan proses untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran hukum dalam kegiatan tersebut.

Setiap data akan diuji, setiap keterangan akan di-

verifikasi. Bahkan, sejumlah pihak terkait direncanakan akan dimintai klarifikasi guna memperjelas duduk perkara.

"Semua masih berproses. Kami pastikan setiap langkah dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Di sisi lain, kasus ini menyentuh aspek yang sensitif: transparansi dan akuntabilitas anggaran, terlebih karena berada di lingkungan lembaga pengawasan seperti Inspektorat. Publik pun menaruh harapan agar proses ini berjalan terbuka dan tuntas.

Kejari Parigi Moutong mengingatkan, di tengah

proses yang masih bergulir, semua pihak diharapkan tetap kooperatif dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Sebab, dari ruang pulbaket inilah nantinya akan ditentukan arah — apakah perkara ini berlanjut ke tahap hukum berikutnya atau berhenti sebagai klarifikasi semata.

Satu hal yang pasti, cerita tentang musala Inspektorat ini belum selesai. Dan Kejari kini tengah berada di garis awal untuk mengungkapnya.

Seperti diberitakan, pembangunan musala di kantor Inspektorat Parigi Moutong bersumber dari APBD Pe-

rubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp200 juta menuai sorotan publik. Bukan semata soal nilai anggaran, melainkan pada mekanisme dan urgensi pelaksanaannya yang dilakukan di pengujung tahun, sementara bangunan belum dapat difungsikan.

CV Kalukubula Sulteng selaku pelaksana hanya menyelesaikan pekerjaan pondasi, tiang cor, serta dinding utama yang masih terbuka dan belum diples ter bagian luarnya. Dengan kondisi demikian, musala itu jelas belum layak digunakan untuk aktivitas ibadah. **ANT**

## KETUA DPRD dari halaman .....

masa depan, mulai dari kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, hingga pembangunan ekonomi hijau, biru, dan ekonomi sirkular berbasis pelestarian lingkungan.

"Ini bukan sekadar kursus, tapi momentum strategis untuk membawa pe-

rubahan nyata di daerah," tegas Arus Abdul Karim, menunjukkan optimisme tinggi di sela kegiatan.

KPPD ini dirancang sebagai ruang konsolidasi nasional, mempertemukan para pimpinan DPRD dalam satu visi besar: memperkuat peran legislatif sebagai pilar

utama pembangunan daerah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Rencananya, kegiatan prestisius ini akan ditutupi langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan betapa strategisnya peran para Ketua DPRD dalam mengawal arah pem-

angunan bangsa.

Dengan keikutsertaan dalam forum nasional ini, Arus Abdul Karim tidak hanya membawa nama Sulawesi Tengah, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai figur pemimpin legislatif yang siap tampil di garis depan perubahan. **WAN**

## CEGAH dari halaman .....

rencana (P2KB) Sigi Riadin Lahido saat ditemui awak media di Sigi, Kamis.

Ia menuturkan salah satu fokus dalam perda kesehatan reproduksi tersebut sebagai upaya pencegahan pernikahan dini yang masih menjadi persoalan di Kabupaten Sigi.

"Tentunya apabila kesehatan reproduksi ini terjamin maka kelahiran bayi yang stunting bisa ditekan, sehingga melalui perda ini menjadi landasan hukum untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur," sebutnya.

Kesehatan reproduksi meliputi kesiapan fisik, mental, medis dan lingkungan yang

reproduksi yang baik," ujarnya

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat menyebutkan Perda kesehatan reproduksi menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi secara terintegrasi, terarah dan akuntabel.

"Pelayanan kesehatan reproduksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan secara menyeluruh dengan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma agama, etika, nilai sosial budaya serta ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Nuim.

Diketahui Pemkab Sigi bersama DPRD setempat menyepakati peraturan daerah tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi pada paripurna di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Sulteng.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi mencatat bahwa pada 2025 kasus stunting di Sigi turun sebesar 21,45 persen dari 33 persen menjadi 11,55 persen. **ANT**

## GENJOT dari halaman .....

meningkatkan pemahaman orang tua terhadap pola asuh dan pemenuhan gizi anak.

"Kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan. Harapannya, kegiatan edukasi dapat terus berlanjut sehingga para orang tua semakin memahami praktik pemberian gizi yang tepat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Perwakilan Pertamina, Jr. Spv II HSSE & Fleet Safety IT Kendari, Taufik Tanjil Muharram, menegaskan bahwa perusahaan memandang fase balita sebagai periode penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

"Upaya peningkatan pemahaman gizi perlu diikuti dengan aksi nyata

di lapangan. Melalui edukasi dan pemberian PMT, kami ingin mendorong perubahan yang berdampak langsung bagi kesehatan anak," jelasnya.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

"Edukasi dan intervensi gizi di tingkat komunitas menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas generasi ke depan. Pertamina terus mendorong program yang memberikan dampak langsung, se-

kaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan tenaga kesehatan," ungkap Lilik.

Program ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui peningkatan kesehatan masyarakat, serta SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui upaya perbaikan gizi dan pencegahan stunting.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus mengembangkan program berbasis masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan, guna mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berdaya saing. **WAN**

## HARGA dari halaman .....

Ia menggunakan singkatan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

Menurut IAEA, aktivitas yang terpantau meliputi pengoperasian reaktor 5MW, fasilitas pengolahan ulang, reaktor air ringan, serta berbagai instalasi lain di kompleks nuklir Yongbyon.

Selain itu, lembaga itu juga melihat adanya pembangunan fasilitas baru yang mirip dengan pabrik pengayaan uranium, yang menandakan kapasitasnya terus bertambah.

Grossi menambahkan program nuklir Korut saat ini diperkirakan telah menghasilkan puluhan hulu ledak.

Indikasi ini terlihat dari aktivitas di berbagai fasilitas, termasuk yang berada di luar Yongbyon.

Temuan ini juga didukung oleh analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang pada 13 April melaporkan citra satelit terbaru menunjukkan adanya fasilitas pengayaan uranium baru yang diduga bisa menghasilkan

material untuk senjata.

Namun, Grossi mengatakan hingga kini IAEA belum menemukan bukti keterlibatan teknologi Rusia dalam program nuklir Korut.

Ia menilai kerja sama antara Rusia dan Korut pada 2025 kemungkinan masih terbatas pada proyek nuklir sipil, meskipun masih terus dipantau.

"Bergerak menuju senjata nuklir tidak akan pernah memberikan peningkatan keamanan bagi negara mana pun," kata Grossi. **CNN**

## ada pembahasan mengenai investasi di bidang kilang dan penyimpanan energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

"Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang pick up, sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan," ujar Bahlil.

Dengan sejumlah langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas energi dapat terus terjaga sepanjang tahun. Kepastian harga BBM subsidi diharapkan memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang di tengah dinamika harga energi global, katanya menambahkan. **ANT**

stabil tanpa menambah beban masyarakat.

"Doain, ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dolar AS itu sudah aman BBM. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar AS. Jadi kita itu baru split 7 dolar AS," kata Bahlil.

Sementara itu, dari sisi pasokan, ia mengatakan pemerintah masih menghadapi kebutuhan impor sekitar 1 juta barel per hari. Kondisi itu terjadi karena konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri baru berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari.

Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang penguatan kerja sama energi dengan Rusia, tidak hanya pada pasokan minyak mentah, tetapi juga pada sektor infrastruktur penunjang. Bahlil menyebut

# Pemkot Palu Segel Sementara Usaha Chicken Bim



PENYEGELAN sementara rumah makan Chiken Bin akibat melanggar aturan menjaga kebersihan. Jumat (17/04/2026). FOTO PIKD DISKOMINFOSANTIK PALU

SULTENG RAYA-Pemerintah Kota Palu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama sejumlah aparat penegak hukum melakukan penyegelan sementara terhadap lokasi usaha Chicken Bim yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, pada Jumat (17/04/2026).

Penyegelan yang mulai berlaku sejak 17 April 2026 tersebut dilakukan akibat pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (Kabid PPUD) Satpol PP Kota Palu, Mohamad Bambang S., S.H., mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan proses penindakan terhadap usaha tersebut. Bahkan, pelaku usaha telah dua kali dikenakan sanksi denda atas pelanggaran serupa.

"Tempat usaha ini memang sudah beberapa kali kami proses, bahkan sudah dikenakan denda sampai dua kali. Namun, di tahun ini pelanggaran tersebut kembali terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penyegelan, pihaknya telah menempuh

berbagai langkah persuasif sesuai prosedur, mulai dari pemanggilan, pemberian edukasi, hingga teguran resmi.

Namun, pihak pengelola usaha tidak memenuhi panggilan yang telah dilayangkan. "Kami sudah mengundang yang bersangkutan, pertama tidak datang, kemudian kami lakukan pemanggilan kedua juga tidak hadir. Sehingga pada tahap berikutnya kami lakukan penindakan melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) bersama pihak kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan instansi terkait," jelasnya.

Hasil sidang yang dilaksanakan pada 9 April 2026 memutuskan untuk melakukan penutupan sementara sebagai bentuk sanksi administratif sekaligus upaya edukasi agar pengelola usaha memperbaiki sistem manajemen pembuangan sampahnya.

"Penutupan ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi sebagai bentuk edukasi agar pengelolaan sampah diperbaiki. Alhamdulillah, dalam masa tenggat sebelum penyegelan ini sudah ada perbaikan yang dilakukan," tambah Bambang.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sanksi tetap harus dijalanakan sesuai keputusan yang telah diambil.

Pemerintah Kota Palu membuka peluang bagi usaha tersebut untuk kembali beroperasi setelah seluruh kewajiban administratif, termasuk pembayaran denda sesuai peraturan daerah, dipenuhi.

"Insyaallah setelah proses administrasi, termasuk pembayaran denda dipenuhi, tempat usaha ini dapat segera dibuka kembali," katanya.

Bambang juga menegaskan bahwa langkah ini menjadi contoh bagi seluruh pelaku usaha di Kota Palu agar senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya terkait kebersihan lingkungan. "Tidak ada diskriminasi dan tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan. Siapapun yang melanggar dan telah melalui seluruh proses sesuai prosedur, tentu akan ditindak," tegasnya. \*ABS

# Untad dan Hainan University Bangun Kolaborasi Global

SULTENG RAYA-Universitas Tadulako (Untad) terus memperluas jaringan kerja sama internasionalnya guna meningkatkan kualitas pendidikan dan riset perguruan tinggi. Bertepatan dengan momen khidmat upacara wisuda pada Kamis, 16 April 2026, Untad dan Hainan University (HNU) secara resmi menandatangani dokumen Memorandum of Agreement (MoA).

Kesepakatan kerja sama ini ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Untad, Dr. sc. Ir Agr, Aiyen Tjoa M.Sc dan Prof. Dr. Qiu Xiguang selaku delegasi dari HNU serta disaksikan secara langsung oleh Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T beserta seluruh peserta wisuda.

Secara garis besar, kerja sama ini bertujuan untuk pengembangan pendidikan tinggi, riset, serta inovasi berbasis kawasan tropis, termasuk dalam meningkatkan kapasitas teknologi dan efisiensi sistem produksi akuakultur laut maupun air tawar di wilayah Sulawesi Tengah.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu mengembangkan dan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil melalui program pelatihan serta kolaborasi penelitian, yang bermuara pada terbangunnya model percontohan budidaya perikanan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah.

Dalam implementasinya, kerja sama ini menargetkan pengembangan spesies budidaya bernilai tinggi. Pada komoditas laut, pengembangan difokuskan pada tiram mutiara, lobster, dan kuda laut. Sementara itu, untuk komoditas air tawar, riset akan menitikberatkan pada spesies tropis bernilai tinggi seperti belut.

Sebagai bagian dari implementasi strategis tersebut, akan dikembangkan Tropical Aquaculture Science and Technology Demonstration Centre (TASTDE) sebagai pusat unggulan yang berperan dalam meningkatkan kapasitas teknologi dan efisiensi produksi sektor akuakultur laut dan air tawar di Sulawesi Tengah. Kehadiran pusat ini diharapkan mampu menjadi model pengembangan akuakultur berkelanjutan yang dapat direplikasi di berbagai daerah, sekaligus mendorong



WAKIL Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Untad, Dr. sc. Ir Agr, Aiyen Tjoa M.Sc bersama delegasi HNU Prof. Dr. Qiu Xiguang membuka kain papan nama kerjasama antar kedua lembaga. FOTO: HUMAS

pertumbuhan ekonomi, peningkatan industri, dan penciptaan lapangan kerja.

Sejalan dengan pembangunan TASTDE, akan dikembangkan pula International Science and Technology Living Lab (STB) sebagai platform terintegrasi yang berfokus pada riset terapan, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat. STB dirancang sebagai ruang pembelajaran berbasis praktik bagi dosen dan mahasiswa, sekaligus mendukung kolaborasi penelitian melalui sistem pembimbingan bersama. Selain itu, STB juga akan menyediakan layanan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan teknis, demonstrasi lapangan, dan transfer pengetahuan, sehingga mampu menjembatani hasil riset dengan kebutuhan nyata pelaku usaha akuakultur dan masyarakat pesisir.

Menanggapi langkah strategis ini, Dr. sc. Agr. Ir. Aiyen Tjoa, M.Sc., menjelaskan bahwa implementasi kesepakatan tersebut akan membawa dampak positif yang sangat besar bagi pengembangan kompetensi sivitas akademika Untad.

"Implementasi kesepakatan ini akan membawa dampak positif bagi pengembangan kompetensi sivitas akademika Untad dan membuka peluang bagi pengembangan riset yang lebih maju, memprioritaskan penerimaan mahasiswa magister atau doktoral ke HNU, serta menghadirkan supervisi eksternal dari HNU yang akan ditunjuk sebagai pembimbing pen-

damping akademik untuk memberikan bimbingan bagi mahasiswa dan dosen Untad" ujarnya.

Wakil Rektor Hainan University, Prof. Qiu Xiguang, dalam pidatonya di hadapan para wisudawan, memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas akademik Untad, khususnya terkait rekam jejak yang mendalam di sektor pertanian tropis dan ilmu perikanan yang menjadi landasan kuat terjalinnya kemitraan ini. Pihaknya menekankan bahwa kesamaan letak geografis kawasan tropis menjadikan sumber daya pertanian Provinsi Hainan dan Indonesia saling melengkapi satu sama lain.

La berharap para alumnus Untad kelak tidak hanya menjadi penggerak inovasi teknologi di tanah air, tetapi juga mampu mengambil peran strategis sebagai jembatan yang mempererat

persahabatan antargenerasi muda Tiongkok dan Indonesia.

Sementara itu Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi internasionalisasi universitas dalam meningkatkan daya saing global. Ia juga menyoroti potensi Sulawesi Tengah yang kaya akan sumber daya perikanan dan pertanian serta keanekaragaman hayati, sehingga sangat potensial sebagai pusat pengembangan inovasi berbasis sumber daya tropis.

Melalui kerja sama ini, diharapkan terwujud penguatan jejaring akademik internasional serta kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kemajuan sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. \*ABS

# PPKS Satyagra Kencana Kota Palu Diluncurkan



PEREMSIAN PPKS Satyagra Kencana Kota Palu oleh Wakil Wali Kota Imelda Liliana di Kantor Satyagra Kencana, Kamis (16/04/2026). FOTO PIKD DISKOMINFOSANTIK PALU

SULTENG RAYA- Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, secara resmi meluncurkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Satyagra Kencana Kota Palu di Kantor Satyagra Kencana, Kamis (16/04/2026).

Peluncuran tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Tengah serta Kepala Dinas P2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa.

Dalam sambutannya, Imelda menyampaikan apresiasi atas hadirnya PPKS Satyagra Kencana sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan yang dekat dengan masyarakat.

"Kehadiran Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga. Ini menjadi ruang layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan keluarga secara komprehensif," ungkap wakil wali kota.

Menurut wakil wali kota, saat ini layanan PPKS telah tersebar di delapan kecamatan di Kota Palu dengan beragam jenis layanan yang tersedia.

Meski demikian, wakil wali kota menilai masih diperlukan peningkatan, terutama dari sisi jam operasional. "Kita mengapresiasi karena layanan ini sudah menjangkau delapan kecamatan dengan berbagai jenis layanan. Namun, jam operasional yang

masih terbatas perlu menjadi perhatian bersama agar akses masyarakat semakin luas," jelas wakil wali kota.

Lebih lanjut, wakil wali kota menegaskan bahwa PPKS tidak hanya berfungsi sebagai pusat konseling, tetapi juga memberikan layanan lain seperti pemasangan alat kontrasepsi (KB), edukasi keluarga, hingga rujukan layanan sosial.

"Ini adalah layanan terpadu. Tidak hanya konseling, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan keluarga, termasuk layanan KB dan edukasi. Harapannya, masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya," tambah wakil wali kota.

Wakil wali kota juga menyoroti pentingnya kesiaapan sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang berkualitas, mengingat kompleksitas permasalahan keluarga di tengah masyarakat.

"Persoalan keluarga itu sangat beragam, mulai dari keharmonisan rumah tangga, KDRT, stunting, hingga kemiskinan. Oleh karena itu, tenaga pelayanan harus memiliki kompetensi dan kepekaan sosial yang tinggi," tegas wakil wali kota.

Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota Palu berharap PPKS Satyagra Kencana dapat terus dikembangkan dan dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan generasi yang berkualitas di masa mendatang. \*ABS

# 4.272 Mahasiswa Untad Ikut Bale Race BTN, Salman Renu Raih Hadiah Laptop

SULTENG RAYA- Universitas Tadulako (Untad) terus mendorong literasi keuangan digital di kalangan mahasiswa, kali ini melalui kolaborasi dengan Bank Tabungan Negara. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah penyelenggaraan program Bale Race (Program Reward for Active Campus Engagement) yang ditujukan bagi mahasiswa aktif pengguna aplikasi mobile banking Bale by BTN.

Program Bale Race tahun 2025 merupakan bentuk apresiasi kepada mahasiswa Untad yang paling aktif melakukan transaksi menggunakan aplikasi Bale by BTN. Sepanjang periode program, tercatat sebanyak 4.272 mahasiswa berpartisipasi dengan total 24.497 transaksi, menunjukkan tingginya antusiasme serta adopsi layanan keuangan digital di lingkungan kampus.

Dari ribuan peserta, tiga mahasiswa dengan perolehan poin tertinggi berhasil meraih penghargaan sebagai pemenang Bale Race Untad 2025, yaitu Juara 1 Salman Renu dengan hadiah satu unit laptop senilai Rp10.000.000, disusul Juara 2 Andika dengan hadiah satu unit Galaxy Tab senilai Rp5.000.000, serta Juara 3 Faisal Adrian yang memperoleh bantuan SPP

senilai Rp3.000.000.

Penyerahan hadiah dilaksanakan secara langsung pada momentum Wisuda Untad Periode 136 yang berlangsung di Auditorium Untad pada 16 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara yang tidak hanya merayakan kelulusan mahasiswa, tetapi juga memberikan penghargaan atas prestasi non-akademik yang berdampak positif.

Dalam testimoninya, Salman Renu sebagai juara pertama mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diperoleh. "Saya tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah laptop hanya karena rutin menggunakan aplikasi Bale by BTN untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari seperti membeli pulsa, token listrik, hingga pembayaran menggunakan QRIS. Program ini sangat menarik dan memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif memanfaatkan layanan digital," ujarnya.

Ia juga mengajak mahasiswa lain untuk ikut berpartisipasi dalam program serupa di masa mendatang. "Semoga teman-teman mahasiswa Untad juga bisa ikut mencoba dan merasakan manfaatnya. Selain memudahkan transaksi, kita juga bisa mendapatkan banyak keuntungan dari



FOTO bersama usai penerimaan hadiah program Bale Race BTN 2026. FOTO: HUMAS

program seperti ini," tambah Salman.

Senada dengan itu, Andika sebagai juara kedua menyampaikan bahwa hadiah tablet yang diperolehnya sangat membantu dalam menunjang aktivitas perkuliahan. "Tablet ini tentu sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan belajar, seperti membaca materi kuliah, mengerjakan tugas, dan mengikuti berbagai aktivitas akademik secara digital," katanya.

Ia juga mendorong mahasiswa Untad lainnya untuk mulai menggunakan layanan Bank BTN dan memanfaatkan aplikasi Bale by BTN. "Saya berharap semakin banyak mahasiswa yang memanfaatkan

layanan digital dari Bank BTN karena sangat memudahkan berbagai transaksi sehari-hari," lanjutnya.

Sementara itu, Faisal Adrian selaku juara ketiga turut mengapresiasi inisiatif Bank BTN dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa. "Program seperti Bale Race ini sangat positif karena tidak hanya memberikan hadiah, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk lebih melek literasi keuangan digital," ungkapnya.

Ia berharap program serupa dapat terus dilanjutkan di masa depan sehingga semakin banyak mahasiswa yang dapat merasakan manfaatnya.

Sebagai tindak lanjut dari kesuksesan program ini, Bank BTN berencana untuk kembali menyelenggarakan Bale Race pada periode tahun 2026 dengan hadiah yang lebih menarik dan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh mahasiswa Untad.

Program Bale Race tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan peningkatan literasi keuangan digital di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Tadulako. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekosistem digital di lingkungan kampus. \*ABS